

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Angger Sigit Pramukti, S.H. dan Meylani Chahyaningsih, S.H, 2018, Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara, Media Pressindo.
- Eka N.A.M Sihimbing, 2020, *Politik Hukum*, CV. Enam Media, Medan.
- Herdiansyah Hamzah, 2021, *Politik Tanpa Korupsi*, Cirebon-Jakarta: CV. Rumah Pustaka.
- Herry Supardan, 2020, *Pengelolaan Keuangan Negara dan Daerah*, Malan., Media Nusa Creative.
- Ikhwan Farojih, 2016, *Pengawasan Keuangan Negara*, Malang, Intrans Publishing.
- Isharyanto, 2015, *Hukum Kelembagaan Negara*, Cetakan Pertama, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, Surakarta.
- Isharyanto, 2016, *Politik Hukum*, C.V Kekata Group, Surakarta.
- Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta, PT. Buana Ilmu Populer, 2007, Hal.163
- Josef Mario Monteiro, 2019, *Hukum Keuangan Negara & Daerah*, Cetakan Pertama, Malang: Setara Press.
- Mirza Nasution, 2015, *Politik Hukum Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Puspantara
- Pandapotan Ritonga, 2021, *Keuangan Negara*, UMSU Press, Medan.
- Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke Empat Belas, Prenadamedia Group, Jakarta.

Jurnal :

- Adam Setiawan, "*Eksistensi Lembaga Pengawasan Pengelolaan Keuangan Negara*", Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol.49 No.2, April 2019
- Erawati, "*Polemik Dana Program Pembangunan Daerah Pemilihani Dalam Prespektif Politik Hukum Penganggaran Indonesia*", Jurnal Simbur Cahaya, Vol.27 No.1, Juni 2020.
- Herawati, "*Pilkada Langsung dan Stabilitas Pemerintahan di Jawa Tengah*" Jurnal Ilmu Sosial, Vol.12 No.2, Tahun 2016.
- Jimly Asshiddiqie. "Fungsi Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat." Makalah Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat-RI. Jakarta, 2011.
[http://jimly.com/makalah/namafile/88/FUNGSI_ANGGARAN Dewan Perwakilan Rakyat.pdf](http://jimly.com/makalah/namafile/88/FUNGSI_ANGGARAN_Dewan_Perwakilan_Rakyat.pdf).
- Mei Susanto, "*Hak Budget Dpr Dalam Pengelolaan Keuangan Negara*," Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, Vol.5 No. 2, 2016.
- Mei Susanto, "*Kedudukan Dana Program Pembangunan Daerah Pemilihani Dewan Perwakilan Rakyat dalam Ketatanegaraan Indonesia*", Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol.24, No.2, April 2017.
- Mieke Rayu Raba, "*Peran Badan Pemeriksa Keuangan (Bpk) Dalam Melakukan Pemeriksaan Terhadap Pengelolaan Keuangan Negara Untuk Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik Menurut UU No. 15 Tahun 2006*", Jurnal Lex Crimen, Vol.8 No.3, Mei 2017
- Riris Katharina, "*Dana Program Pengembangan Daerah Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat RI (Dana Program Pembangunan Daerah Pemilihani) Dalam Perspektif Kebijakan Publik*," Info Singkat Pemerintahan Dalam Negeri 7, no. 12 (2015).

Sarah Nur Annisa, “*Konsep Independensi Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Perspektif Teori The New Separation Of Power Bruce Ackerman*” JIL: Journal of Indonesian Law, Volume 2, Nomor 2, Desember Tahun 2021: 232

Yutirsa Yunus dan Reza Faraby, “*Reduksi Fungsi Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Kerangka Checks And Balances: Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35PUU-XI2013*,” Jurnal Yudisial 7, no. 2 (2014): hlm. 200

Internet :

Agus Riewanto, “*Dana Program Pembangunan Daerah Pemilihani Rawan Dikorup Dewan Perwakilan Rakyat.*” Website Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, April 2017.
<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11336>.

Danang Munandar, *Sistem Pemilu di Indonesia*,
<https://banyumasdaily.com/category/fiskal/>

Erwin Dariyanto, “*Begini Kisah Ngototnya Dewan Perwakilan Rakyat Mengusulkan Dana Program Pembangunan Daerah Pemilihani Rp 11,2 T.*” detikNews, 24 Juni 2015. <https://news.detik.com/berita/d-2950741/cerita-sby-tolak-dana-aspirasi-dpr-karena-dimarahi-rakyat-5-tahun-lalu>.

Inspektorat Daerah, “*Pengertian Pengawasan*”
<https://inspektoratdaerah.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/pengertian-pengawasan-82>

Martin Sihombing, *Korupsi Dana Program Pembangunan Daerah Pemilihani: Politisi Pks Divonis 9 Tahun Penjara*, 21 Maret 2018,

<https://kabar24.bisnis.com/read/20180321/16/752667/korupsi-dana-aspirasi-politisi-pks-divonis-9-tahun-penjara>

Peraturan-Peraturan :

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3)

Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengusulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan